

Kinerja Pendamping sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program Keluarga Harapan

The performance of the Assistant as the Success Key of the Family Hope Program

Elly Kuntjorowati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Jl. Kesejahteraan Sosial No 1, Nomor Telp (0274) 377265, Fax (0274) 373530, Email ellykuntjorowati@gmail.com, HP. 087838724537
Naskah diterima 5 Juni 2020, direvisi 22 Juli 2020, disetujui 27 Agustus 2020

Abstract

The assistants or facilitators in the family hope program (=PKH) were needed because beneficiary families were very poor families who, on average, did not have sufficient capacity to fight for their rights. PKH Facilitators were needed to assist the duties of the Family Hope Program Implementing Unit (UPPKH) at the central or regional levels. This study aimed to determine the various tasks of PKH facilitators in the success of the program and to determine the correlation between PKH facilitator performance and program success. This type of research was evaluative research. The data collection method used was a structured questionnaire where respondents chose answers that were already available. Data were analyzed using Pearson Correlation. The results showed that PKH Facilitators had main duties, routine tasks and supporting tasks. The results of the data analysis showed that the tasks of the assistants or facilitators really supported the success of the program. The recommendation was addressed to the Ministry of Social Affairs because PKH facilitators were recruited by the Ministry of Social Affairs. It was concluded that PKH Facilitators needed additional training, especially those related to empowering KPM to run economically productive businesses. Every month PKH Facilitators needed to hold meetings with Beneficiary Families (KPM) and to carry out empowerment to improve the welfare of KPM so that they could be independent.

Keywords: companion performance; Family Hope Program; spearhead.

Abstrak

Pendamping pada program keluarga harapan diperlukan karena keluarga penerima manfaat merupakan keluarga sangat miskin yang rata-rata tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pendamping PKH dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) di pusat ataupun daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ragam tugas-tugas pendamping PKH dalam mensukseskan program serta untuk mengetahui korelasi antara kinerja pendamping PKH dengan keberhasilan program. Jenis penelitian adalah penelitian evaluatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket secara terstruktur dimana responden memilih jawaban yang telah tersedia. Data dianalisa dengan menggunakan Pearson Correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH mempunyai tugas pokok, tugas rutin dan tugas pendukung. Hasil analisa data menunjukkan bahwa tugas-tugas pendamping sangat mendukung keberhasilan program. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial karena pendamping PKH direkrut oleh Kementerian Sosial. Disimpulkan bahwa pendamping PKH memerlukan diklat tambahan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan KPM untuk menjalankan usaha ekonomis produktif. Setiap bulan pendamping PKH perlu melakukan pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan KPM agar mereka dapat mandiri.

Kata Kunci: kinerja pendamping; Program Keluarga Harapan; ujung tombak.

Pendahuluan

Program Keluarga Harapan atau *Conditional Cash Transfer* (CCT), istilah yang digunakan oleh Bank Dunia untuk Program Kemiskinan. Program ini di Negara Amerika Latin dianggap sebagai program yang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan status kesehatan keluarga miskin dan ibu. Tujuan umum dari CCT atau PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan perubahan perilaku keluarga penerima manfaat (KPM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan (Elly Kuntjorowati, Ikawati, Sri Yuni Murtiwidayantii, Tri Laksmi Udiati, 2019). Program ini sejak awal dimulai telah ada sejumlah penelitian yang mencoba menilai dampak program bagi KPM. Penelitian dan survey lapangan di tempat yang berbeda telah dilakukan oleh berbagai instansi baik domestik maupun internasional. Dalam upaya awal, Bappenas (2009) mencoba melakukan penilaian kuantitatif menggunakan intervensi acak berbasis rumah tangga, dengan pengukuran sebelum dan setelah intervensi dalam perawatan dan control, dan hasil menunjukkan bahwa program ini sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan (Bappenas, 2009). Program ini berhasil meningkatkan status kesehatan ibu dan anak (Gertler, P, 2004); mengurangi defisiensi nutrisi (Hoddinot, J. E., Skoufias, 2004) peningkatan ekonomi lokal (Coudy, D. and R.L. Haris, 2001). Di beberapa negara, CCT telah menjadi program bantuan sosial terbesar yang mencakup jutaan rumah tangga miskin, seperti yang terjadi di Brasil dan Meksiko. CCT telah dipuji sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara yang sangat tidak setara seperti di Amerika Latin; program ini membantu rumah tangga keluar dari lingkaran setan di mana kemiskinan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya; program ini mempromosikan kesehatan anak, gizi, dan sekolah; dan membantu negara-negara memenuhi pembangunan milenium (Ariel Fiszbein and Norbert Schady, 2009).

Keberhasilan PKH salah satunya ditentukan oleh pendampingan program yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan oleh

pendamping PKH. Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu serta lulus seleksi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu (Kementerian Sosial, Ditjen Linjamsos, 2016). Pelaksana PKH di tingkat kecamatan adalah pendamping, yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Pendamping PKH merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat baik di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Pendamping PKH dalam pelaksanaan program di lapangan secara langsung ataupun tidak langsung sangat menentukan keberhasilan program. Kinerja para pendamping secara teknis melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan. Kesuksesan suatu program tergantung peran para pendamping sebagai sesuatu yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran pendamping sangat penting dalam kesuksesan program.

Pendamping mempunyai peran khusus diharapkan dapat memandu para penerima PKH dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan. Para pendamping ini tidak serta merta langsung terjun ke lapangan untuk mendampingi penerima PKH. Namun, pendamping diberikan bekal pengetahuan bagaimana untuk mengarahkan para penerima PKH dalam melaksanakan kewajibannya.

Pendampingan diperlukan karena beberapa alasan yaitu: a) PKH merupakan program perlindungan bantuan sosial bagi KPM peserta PKH yang dilakukan secara berkelanjutan; b) pendampingan memberikan ruang tanpa batas bagi peserta PKH untuk saling belajar dan bertanggung jawab atas komitmen yang telah disepakati dan; c) memperkuat modal sosial bagi

peserta PKH terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Agar tujuan tersebut terealisasi, maka dibutuhkan peran pendamping dan operator PKH. Dalam menjalankan tugasnya, pendamping dan operator PKH dibekali kemampuan agar dapat melaksanakan kegiatan PKH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memberikan motivasi, fasilitasi serta advokasi kepada KPM peserta PKH di lokasi tugasnya. Pendampingan ini sangat penting dikarenakan peserta PKH merupakan keluarga sangat miskin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian untuk merubah perilaku keluarga agar aktif berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan anak mereka, dan juga untuk memastikan peserta PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan program yang telah ditetapkan. Mereka dibekali dengan beberapa pengetahuan antara lain: tujuan PKH, syarat kepersertaan PKH, komponen PKH, siapa yang berhak menerima PKH, kewajiban peserta PKH, pengurus PKH dan jumlah indeks bantuan PKH (Kemensos RI, 2017). Pendamping PKH dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) di pusat ataupun daerah guna melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya dalam waktu cepat. Tugas-tugas yang harus dilakukan secara cepat tersebut di antaranya segera membentuk kelompok peserta PKH beranggotakan 10-30 peserta serta tempat tinggalnya berdekatan, hal ini dilakukan segera setelah adanya penetapan dari Kementerian Sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul : Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program.

Permasalahan yang diajukan adalah: Apa saja kinerja pendamping PKH dalam rangka mendukung keberhasilan program? dan seberapa besar korelasi antara kinerja pendamping PKH dengan keberhasilan program. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja pendamping PKH dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mengetahui korelasi antara kinerja Pendamping PKH dengan keberhasilan program.

Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah evaluasi untuk mengetahui program kerja pendamping PKH dalam mendukung keberhasilan program, sedangkan pendekatan penelitian secara kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan matematis, dan hipotesis. Hipotesis alternatif yang diajukan antara lain terdapat korelasi antara pendamping PKH dengan keberhasilan program, sedangkan hipotesa nihil tidak terdapat korelasi antara pendamping PKH dengan keberhasilan program. Analisa untuk mengetahui ada atau tidak korelasi dan uji hipotesis dengan menggunakan *Pearson Correlation*.

Penelitian ini secara purposive mengambil lokasi di Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi karena jumlah pendamping Kota Yogyakarta cukup banyak ada 60 orang (UPPKH Kota Yogyakarta). Metode pengumpulan data menggunakan angket. Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006), sedangkan Sugiyono menjelaskan bahwa angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012). Angket merupakan sejumlah pertanyaan yang jawabannya telah tersedia dan responden tinggal memilihnya sehingga memudahkan responden untuk menjawabnya. Pertanyaan dapat dibuat terstandar sehingga pertanyaannya bisa dibuat sama untuk seluruh responden, dan pengolahannya lebih mudah.

Penelitian ini dalam pengumpulan data juga menggunakan wawancara terstruktur karena wawancara tersebut sudah terstruktur melalui instrument, dan responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Wawancara ditujukan ke semua responden penelitian ini yakni pendamping PKH, UPPKH Kecamatan, Dinas Sosial, KPM, untuk mendapatkan data primer, terutama tentang program kerja pendamping PKH. Selain melalui angket dan wawancara informasi juga dapat

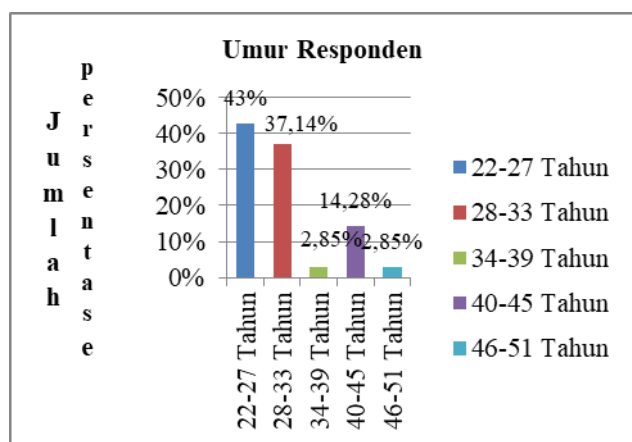
diperoleh lewat data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Sanafiah Faisal, 2007). Telaah dokumen terutama digunakan untuk melengkapi data primer yang sekiranya masih kurang.

Responden penelitian ini seluruhnya berjumlah 35 orang yang terdiri dari: pendamping PKH 30 orang, pegawai dinas sosial satu orang, koordinator UPPKH kecamatan satu orang dan KPM tiga orang.

Program Kerja Pendamping PKH dalam Mendukung Keberhasilan Program

Umur Responden

Umur sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Bagi usia yang masih muda peningkatan usia akan menambah produktivitas kerja, tapi sebaliknya bagi yang sudah berusia tua penambahan usia akan menurunkan produktivitas kerja karena faktor kemunduran fisik dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Sentana (2013) yang mengatakan bahwa umur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Melalui Gambar 1 berikut akan dapat diketahui mengenai usia responden penelitian ini.



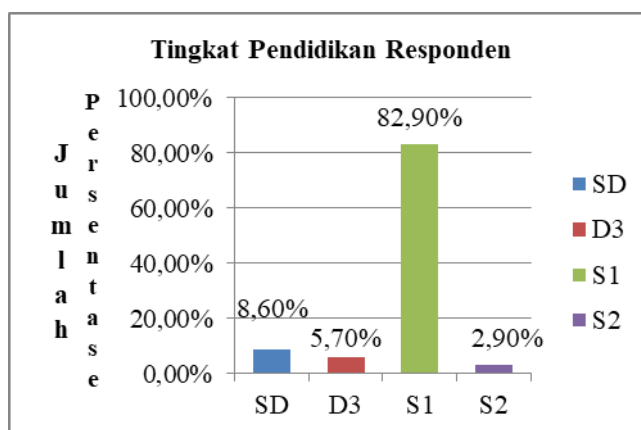
Gambar 1: Umur Responden
Sumber : Hasil analisis

Dari Gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 50 persen berada

pada usia 22 hingga 27 tahun, merupakan usia yang masih sangat produktif untuk berkarya dan menghasilkan produk pekerjaan. Responden dengan jumlah 26,67 persen berusia 28 hingga 33 tahun, usia 40 hingga 45 tahun berjumlah 16,67 persen, dan usia 34 hingga 39 tahun berjumlah sama dengan usia 46 hingga 51 tahun yaitu 3,33 persen. Penduduk usia produktif adalah penduduk usia kerja yang sudah bisa menghasilkan barang dan jasa. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1998 menggunakan penduduk umur 15 tahun ke atas sebagai kelompok usia kerja. Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok penduduk yang produktif, dan kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi produktif.

Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan Negara (Pemerintah Indonesia, 2003). Melalui Gambar 2 dapat diketahui tingkat pendidikan responden penelitian ini.



Gambar 2: Tingkat Pendidikan reponden
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa responden terbanyak dengan jumlah 82,90 persen adalah berpendidikan S1, dan

mereka yang berpendidikan SD sejumlah 8,6 persen adalah keluarga penerima manfaat (KPM), dan yang berpendidikan D3 berjumlah 5,71 persen dan sisanya responden berpendidikan S2 berjumlah 2,9 persen. Pendamping PKH merupakan salah satu pendukung suksesnya PKH. Pendampingan PKH di Kota Yogyakarta direkrut secara khusus untuk melakukan kegiatan pendampingan. Untuk menjadi pendamping PKH ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang bertempat tinggal di kecamatan yang bersangkutan dan berpengalaman sebagai pekerja sosial. Dari grafik tersebut dapat dimaknai pula meskipun persyaratan minimal pendidikan adalah SLTA, namun kenyataannya 90 persen berpendidikan S1. Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Sulit rasanya untuk mengatakan bahwa kemajuan pembangunan suatu negara dapat dicapai tanpa adanya investasi di bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu komponen yang digunakan dalam pengukuran Human Development Index (HDI) (Ravik Karsidi, 2007).

Wilayah Dampingan

Jumlah pendamping seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2019 berjumlah 36.000 orang. Melalui tabel berikut akan dapat diketahui wilayah dampingan pendamping PKH Kota Yogyakarta.

Tabel 1 : Wilayah Kerja Dampingan

Wilayah Dampingan	f	%
Kecamatan Danurejan	1	3,3%
Kecamatan Gedong Tengen	3	10%
Kecamatan Gondokusuman	1	3,3%
Kecamatan Gondomanan	3	10%
Kecamatan Jetis	2	6,7%
Kecamatan Keraton	2	6,7%
Kecamatan Kotagede	3	10%
Kecamatan Mantri Jeron	2	6,7%
Kecamatan Mergangsan	2	6,7%
Kecamatan Ngampilan	1	3,3%
Kecamatan Pakualaman	1	3,3%
Kecamatan Tegalrejo	2	6,7%
Kecamatan Umbulharjo	4	13,3%
Kecamatan Wirobrajan	3	10%
Jumlah	30	100%

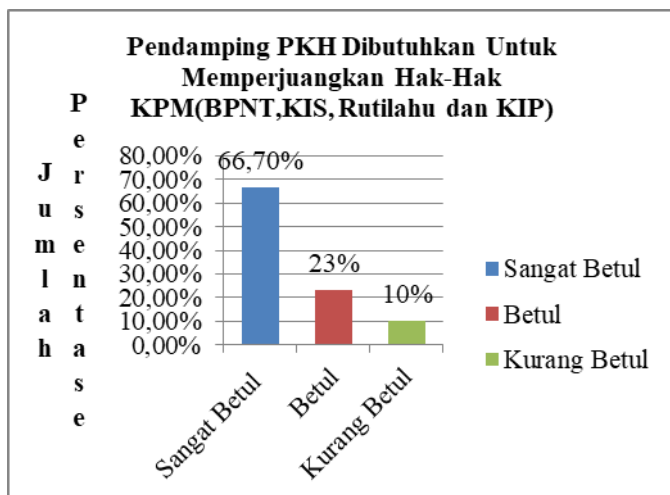
Sumber: Hasil wawancara diolah

Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa responden yang merupakan pendamping PKH di suatu kecamatan bisa terdiri dari satu hingga empat orang. Kecamatan Umbulharjo jumlah pendamping paling banyak yaitu empat orang atau 13,3 persen, kemudian diikuti Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Wirobrajan masing-masing 10 persen. Satu orang pendamping bertugas mendampingi 250 KPM, dan jumlah KPM Kota Yogyakarta hingga akhir tahun 2019 sebanyak 11.455 KPM.

Jumlah Pendamping PKH tiap kecamatan ditentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan dan didasarkan atas 6 (enam) aspek berikut: 1) kondisi topografi; 2) jumlah desa/kelurahan; 3) jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan; 4) waktu tempuh rata-rata dari kecamatan ke desa; 5) waktu tempuh rata-rata ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; 6) alat transportasi yang digunakan (Ditjen Linjamsos, 2016a).

Memperjuangkan Hak-Hak KPM

Peserta PKH sebagian besar mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memperjuangkan hak-hak yang mereka butuhkan. Pendampingan dilakukan bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan hak sebagai peserta PKH dan hak lainnya terkait dengan program-program komplementaritas baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui Gambar 3 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



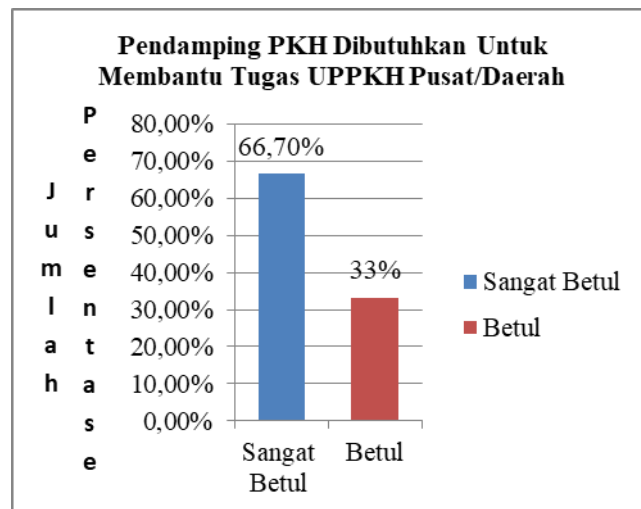
Gambar 3: Pendamping PKH Dibutuhkan untuk Memperjuangkan Hak-Hak KPM
 Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 3 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 66,70 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH dibutuhkan untuk memperjuangkan hak-hak KPM seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), rumah tidak layak huni (Rutilahu), kelompok usaha bersama (KUBE) dan kartu Indonesia pintar (KIP). Responden sejumlah 23 persen mengatakan betul, dan hanya 10 persen saja yang mengatakan kurang betul. Memperjuangkan hak-hak KPM merupakan tugas pokok pendamping PKH. Pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan memiliki peran yang sangat strategis. Mereka memainkan berbagai peranan penting sebagai ujung tombak yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Penerima Manfaat (KPM), sehingga mereka berdaya untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka (Susantyo. B, 2018).

Pendamping PKH Membantu Tugas UPPKH Pusat dan Daerah

Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) Pusat/Daerah dalam melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian masalah dalam waktu cepat, tugas tersebut merupakan tugas pokok pendamping PKH. Personil UPPKH kecamatan terdiri dari pendamping PKH, jika

satu kecamatan terdapat lebih dari satu orang pendamping, maka ditunjuk satu orang sebagai koordinator kecamatan. Melalui Gambar 4 berikut akan dapat diketahui lebih jelas mengenai hal ini.

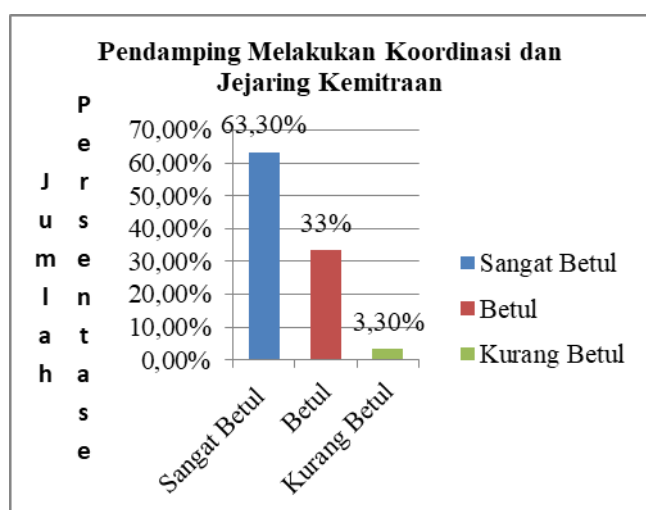


Gambar 4: Pendamping PKH Dibutuhkan untuk Membantu Tugas UPPKH Pusat/Daerah
 Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 4 tersebut dapat diketahui responden sejumlah 66,70 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) di tingkat kecamatan, yang terdiri dari empat belas kecamatan yaitu: Kecamatan Danurejan, Gedong Tengen, Gondomanan, Gondokusuman, Jetis, Kraton, Kotagede, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan. Responden sebagian lagi sejumlah 33 persen mengatakan betul. Tugas pendamping PKH ke UPPKH antara lain melakukan perubahan status KPM dari tidak hamil menjadi hamil, pendidikan anak dari SD ke SMP, perubahan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap besar bantuan yang diterima. Tugas UPPKH ke pendamping PKH antara lain menyampaikan jadwal pencarian. Setiap bulan pendamping PKH diwajibkan membuat laporan perkembangan kemajuan pendampingan yang diserahkan ke UPPKH Kabupaten dan UPPKH Kabupaten memasukkan data laporan informasi tersebut pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKH yang terhubung secara online dengan UPPKH Pusat sehingga laporan tersebut bisa diakses UPPKH Pusat (Habibulah, 2011).

Pendamping PKH Melakukan Koordinasi dan Jejaring Kemitraan

Pendamping PKH melakukan seluruh tugas-tugas pokok pendamping sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan dalam buku pedoman dan kebijakan program antara lain koordinasi dengan camat, lurah, RW, dan RT terutama untuk menetapkan waktu, menyiapkan fasilitas tempat pertemuan dan sarana yang diperlukan. Melalui Gambar 5 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



Gambar 5: Pendamping PKH Melakukan Koordinasi dan Jejaring Kemitraan

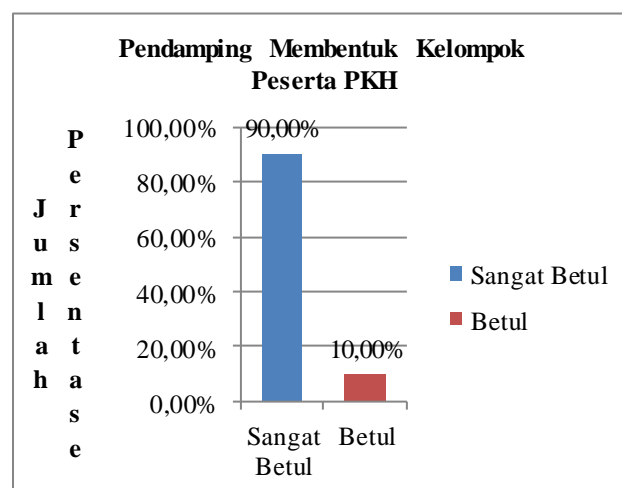
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 5 tersebut dapat diketahui bahwa responden terbanyak dengan jumlah 63,30 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH melakukan koordinasi dengan camat, lurah, RW, dan RT terutama pada saat akan melakukan sosialisasi program dan menentukan jumlah undangan. Pendamping juga diharapkan membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar kelembagaan PKH dan unsur berbasis masyarakat meliputi organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSK), wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSMB), karang taruna, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada pelaksanaan pendampingan, pendamping sosial juga membangun jejaring/kemitraan dengan berbagai pihak. Jejaring yang dibangun lainnya adalah dengan UPT kesehatan, UPT pendidikan, BNI dan Badan Urusan Logistik (Bulog), dan (*service*

provider). Pada setiap program dan kegiatan, termasuk pendampingan sosial jejaring merupakan faktor penting dan menentukan keberhasilan (Harisman. K, 2017).

Pendamping PKH Membentuk Kelompok Peserta PKH

Pendamping PKH juga melakukan tugas-tugas rutin antara lain akan membagi dan membentuk peserta PKH setelah peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kelompok itu akan beranggotakan 15 hingga 30 orang peserta PKH. Pendamping juga akan memfasilitasi pemilihan ketua kelompok. Melalui grafik berikut akan dapat diketahui lebih jelas mengenai hal ini.



Gambar 6: Pendamping PKH Membentuk Kelompok Peserta PKH

Sumber : Hasil wawancara diolah

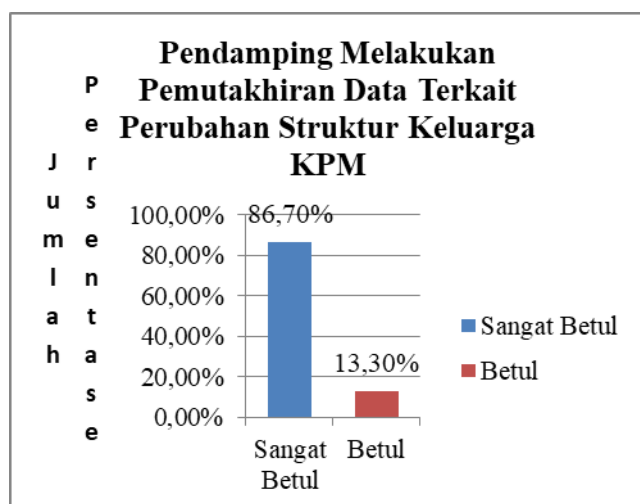
Dari Gambar 6 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 90 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH membentuk kelompok peserta PKH, dan sebagian kecil responden sejumlah 10 persen mengatakan betul. Pembentukan kelompok peserta PKH ini terdiri dari 15 hingga 30 orang peserta PKH dengan beberapa ketentuan. a) setiap kelompok terdiri dari peserta PKH yang tempat tinggalnya berdekatan; b) setiap kelompok ada ketuanya yang dipilih oleh peserta PKH. Pendamping memfasilitasi untuk pemilihan ketua kelompok.

Sarwono, S. W. (2001) menjelaskan bahwa kelompok dapat dibedakan menjadi kelompok formal dan kelompok non formal.

Mengacu pada pendapat ini, sesungguhnya anggota PKH sudah tergabung dalam kelompok formal, sejak PKH dimulai tahun 2007. Sebagai sesama peserta PKH mereka dikoordinir oleh seorang tenaga pendamping yang ditugaskan oleh penyelenggara program. Mereka merupakan kelompok formal karena terikat dengan berbagai peraturan yang ada pada PKH. Dalam perjalanannya kelompok non formal bisa saja terbentuk sesuai kebutuhan KPM dalam mengembangkan usaha ekonomis produktifnya.

Pendamping Melakukan Pemutakhiran Data KPM

Pendamping melakukan pemutakhiran data yang merupakan tugas rutin apabila ada perubahan struktur keluarga penerima bantuan PKH, baik dari segi penambahan ataupun pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan. Mengenai hal ini dapat diketahui pada Gambar 7 berikut ini.



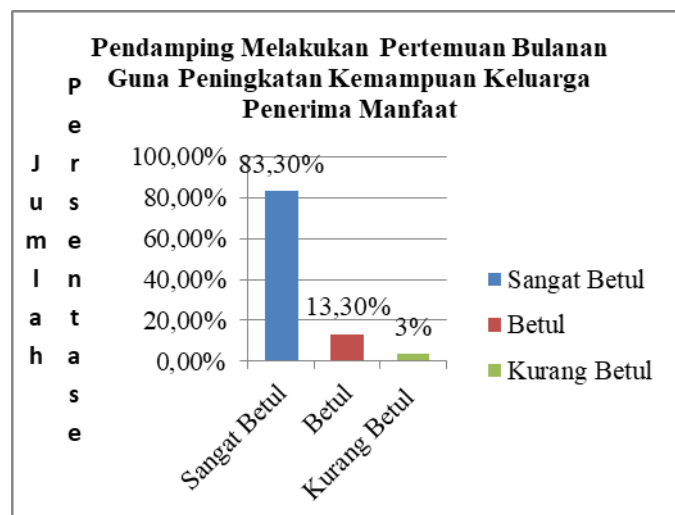
Gambar 7: Pendamping Melakukan Pemutakhiran Data Terkait Perubahan Struktur Keluarga KPM
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 7 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 86,70 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH melakukan pemutakhiran data terkait adanya perubahan struktur keluarga KPM, baik itu penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan. Hal tersebut merupakan tugas rutin pendamping PKH. Pendamping akan melakukan pemutakhiran data apabila anak KPM pindah sekolah, pindah alamat, atau kesalahan identitas. Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah

untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan (Kemensos RI, 2019).

Pendamping Melakukan Pertemuan Bulanan Guna Peningkatan Kemampuan Keluarga Penerima Manfaat

Pendamping melakukan pertemuan bulanan dengan KPM, program ini disebut dengan program peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), sebuah program yang melekat pada PKH. Program ini memberdayakan KPM dan membantu KPM agar mengerti akan hak dan kewajiban sebagai anggota PKH. Melalui Gambar 8 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



Gambar 8: Pendamping Melakukan Pertemuan Bulanan Guna Peningkatan Kemampuan Keluarga Penerima Manfaat
Sumber : Hasil wawancara diolah

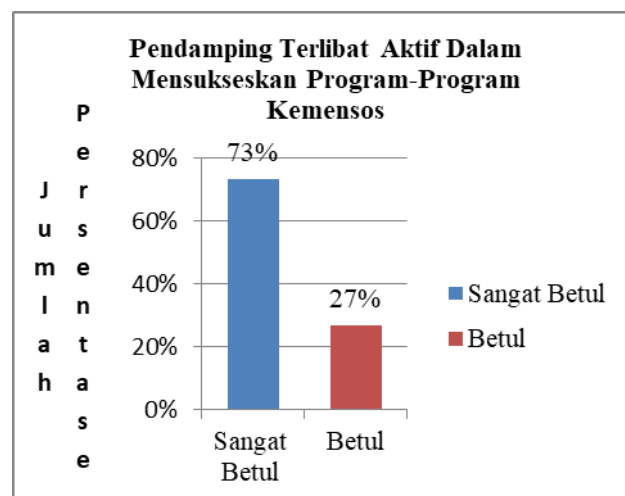
Dari Gambar 8 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 83,30 persen mengatakan sangat betul jika pendamping melakukan pertemuan bulanan dengan seluruh KPM, responden sejumlah 13,3 persen mengatakan betul, dan sisanya sejumlah 3,3 persen mengatakan kurang betul. Pertemuan bulanan ini merupakan tugas pendukung pendamping PKH, yang merupakan program komplementar dari PKH, artinya pertemuan bulanan ini merupakan program melekat pada PKH, yang bertujuan untuk memberdayakan KPM agar meningkatkan kemampuan di bidang

usaha ekonomis produktif, agar tidak selalu tergantung pada program dan menghilangkan budaya miskin sehingga bisa mandiri. Pertemuan bulanan ini juga dilakukan guna sosialisasi dan internalisasi program yang diberikan kepada KPM, curah pendapat dan berbagi informasi bagi KPM, menerima keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi KPM, memberikan motivasi kepada KPM guna meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban KPM, memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian peserta KPM, mendorong peserta KPM untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, seperti kelompok usaha bersama (KUBE). Pertemuan bulanan ini juga telah berhasil meningkatkan pengetahuan KPM terhadap kesehatan bagi ibu hamil dan balita, dan juga kewajiban menyekolahkan anak, karena biasanya keluarga miskin kurang memperhatikan kesehatan dan pendidikan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak memadai. Banyak penelitian yang sudah membuktikan akan keberhasilan program ini (Ariel Fiszbein and Nobert R Schady, 2009). Di Filipina program yang berasal dari World Bank bernama *Conditional Cash Transfer* (CCT) telah terbukti dan efektif meningkatkan dan memberdayakan kesejahteraan keluarga miskin (Jishnu Das Qui, Toando and Benk Ozier, 2005). Keberhasilan program tidak terlepas dari kinerja pendamping yang begitu banyak, termasuk pemberdayaan, maka pengetahuan dan keterampilan pendamping juga perlu untuk ditingkatkan, sehingga pada pertemuan bulanan yang dijadwalkan, pendamping mempunyai banyak ilmu pengetahuan untuk diajarkan pada KPM.

Pendamping Terlibat Aktif dalam Menyukseskan Program-program Kemensos

Pendamping PKH terlibat aktif dalam menyukseskan program-program Kementerian Sosial, karena pada KKS atau kartu kombo yang digunakan KPM untuk mencairkan bantuan sosial PKH tersebut terdapat berbagai macam program pengentasan kemiskinan seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), lanjut usia, dan

dipastikan setiap penerima BPNT adalah juga sebagai penerima PKH. Melalui Gambar 9 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



Gambar 9: Pendamping PKH Terlibat Aktif dalam Menyukseskan Program-Program Kemensos
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 9 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 73 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH non tunai terlibat aktif dalam menyukseskan program-program pengentasan kemiskinan yang berasal dari Kementerian Sosial, sebagian lagi responden sejumlah 27 persen mengatakan betul. Pendamping PKH diharapkan keterlibatannya dalam menyukseskan program-program pengentasan kemiskinan yang berasal dari Kementerian Sosial. Oleh karenanya dalam rangka pengembangan, maka perlu menjalin komunikasi dan koordinasi serta membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar kelembagaan PKH (Ditjen Linjamsos, 2016b).

Korelasi antara Kinerja Pendamping dan Keberhasilan Program Keluarga Harapan

Dalam pelaksanaan PKH, pendamping merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Korelasi antara pendamping PKH dengan keberhasilan program dapat diketahui melalui Tabel 2 berikut ini yang dianalisa dengan menggunakan *Pearson Correlation*.

Tabel 2 Korelasi antara Pendamping PKH dan Keberhasilan Program

Korelasi Pendamping PKH dan Keberhasilan Program	Pendamping PKH	Keberhasilan Program
Pendamping PKH		
Pearson Correlation	1	1.000**
Sig		.000
Keberhasilan Program		
Pearson Correlation	1**	1
Sig	.000	

** Correlation is significant at the 0.01 level

Terlihat tanda ** yang berarti signifikan. Tingkat kepercayaan korelasi tersebut adalah 99% dengan $\alpha=0,01(1\%)$. Dari tabel tersebut diperoleh *Pearson Correlation* 1 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendamping PKH dengan keberhasilan program. Hubungan korelasi antara *Independent Variables* (Pendamping PKH) dengan *Dependent Variable* (Keberhasilan Program) sangat kuat yang ditunjukkan dengan nilai korelasi 1**, dengan *P-Value/Sig* sama dengan $000 < 0,05$. Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara ke dua variable. Tanda ** menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara *Independent Variables* dengan *Dependent Variable* adalah hubungan yang berbanding lurus artinya semakin besar peran pendamping PKH akan semakin mendukung keberhasilan program. Dapat disimpulkan bahwa hubungan pendamping PKH dengan keberhasilan program adalah sangat kuat, signifikan dan searah.

Penutup

Kesimpulan. Dari hasil analisa tersebut diketahui bahwa pendamping PKH mempunyai tugas yang sangat berkaitan erat dengan implementasi PKH sehingga dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan program, karena mereka memainkan peranan penting dengan beberapa tugas yang dibebankan. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas pokok, rutin dan pendukung. Tugas pokok antara lain memperjuangkan hak-hak peserta PKH seperti bantuan pangan nontunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan rumah tidak layak huni (RTLH). Melakukan koordinasi dengan camat, RW/RT dan menjalin jejaring kemitraan dengan Bulog, BNI, UPTD Kesehatan dan UPTD Pendidikan. Tugas rutin. Tugas rutin di antaranya melakukan pemutakhiran data apabila ada perubahan alamat,

pendidikan anak, ibu hamil dan jumlah anak. Tugas pendukung antara lain ikut aktif dalam menyukseskan program-program Kemensos, terutama yang berkaitan dengan PKH seperti P2K2, yang mengharuskan pendamping memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk memberdayakan KPM terutama di bidang ekonomis produktif.

Rekomendasi. Pendamping PKH membutuhkan pelatihan lanjutan karena begitu banyak tugas yang harus dilaksanakan terutama dalam hal memberdayakan KPM agar bisa mandiri dan tidak tergantung selamanya pada program, maka pendamping perlu dibekali pengetahuan tambahan terutama yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pelatihan jangan hanya di awal menjelang menjadi pendamping PKH. Pelatihan tersebut terutama yang berkaitan dengan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pendamping minimal setahun sekali untuk mengetahui kerja pendamping.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur pertama kami ucapkan Kepada Allah Tuhan Yang Esa karena berkat rahamat dan hidayah yang beliau berikan maka penelitian ini dapat selesai dilaksanakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala B2P3KS, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, Sekretariat UPPKH, Koordinator Pendamping PKH, Operator dan seluruh pendamping PKH yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara, kami ucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

Ariel Fiszbein and Norbert Schady. (2009). *Conditional Cash A World Bank Policy Research Report*. The World Bank.

Bappenas. (2009). *Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan 2009*. Bappenas.

Coudy,D and R.L, Haris. (2001). *Evaluating Transfer Programs Within a General Equilibrium Framework*. Washington, DC, *International Food Policy Research Institute*, 110.

Ditjen Linjamsos. (2016a). *Buku Kerja Pendamping PKH*.

- Ditjen Linjamsos. (2016b). *Buku Kerja Pendamping PKH*. Elly Kuntjorowati, Ikawati, Sri Yuni Murtiwiidayantii, Tri Laksmi Udiati. (2019). Conditional Cash Transfer Breaks the Chain of Poverty for Next Generation. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol 3 No 9 2019. <https://doi.org/doi:10.30845/ijhss.v9n3p16>
- Gertler, P. (2004). Do conditional cash transfers improve child health? Evidence from PROGRESA's control randomized experiment'. *American Economic Review*.
- Habibulah. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Karawang. *Informas*, 16.
- Harisman.K. (2017). Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT Indofood FrytoLay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut). *Jurnal Istek Sunan Gunung Jati*, Vol X No 1.
- Hoddinot,J, E. Skoufias. (2004). The Impact of PROGRESA on Food Consumption. *Economic Development and Cultural*.
- Jishnu Das Qui, Toando and Benk Ozier. (2005). *World Bank Research Observer*. Vol 20 No 1 March 2005. <https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1093/wbro/lki005>
- Kemensos RI. (2017). *Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Ditjen Linjamsos.
- Kemensos RI. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Ditjen Linjamsos.
- Kemnterian Sosial , Ditjen Linjamsos. (2016). (1) *BUKU KERJA PENDAMPING DAN OPERATOR PKH / eka wardana—Academia.edu*. https://www.academia.edu/28297357/BUKU_KE_RJA_PENDAMPING_DAN_OPERATOR_PKH
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-undang NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ravik Karsidi. (2007). *Sosiologi Pendidikan*. LPP UNS dan UNS Press.
- Sanafiah Faisal. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (n.d.). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Rev VI)*. P.T. Rineka Cipta.
- Susantyo. B. (2018). *Optimalisasi Peran Pendamping Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Puslitbang Kesos.